

Vol. V No. 3 September 2004

ISSN : 1411 - 5352

Jurnal

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TERAKREDITASI

SK. Dirjen Dikti No. 52/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 12 Nopember 2002



Diterbitkan oleh:

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER**

Bekerjasama dengan

DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

ISSN : 1411 - 5352

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Merupakan jurnal ilmiah *terakreditasi* yang memuat artikel ilmiah hasil penelitian atau kajian konseptual/analisis kritis dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial

DEWAN REDAKSI

Ketua Penyunting

Suranto

Wakil Ketua

Sukidin

Penyunting Pelaksana

Dwi Suparno

Sri Kantun

Bambang Hari Purnomo

Sumardi

Djupriyanto

Penyunting Ahli

Simanhadi Widyaprakosa (UNEJ)

Agus Suman (UNIBRAW)

Tjuk Wirawan (UNEJ)

Suhartono (UGM)

Suyanto (UNY)

Mutrofin (LSM)

Pelaksana Tata Usaha

Sutrisna Djaya

Sri Handayani

Nurul Umamah

M. Na'im

Imam Syafi'i

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL terbit pertama kali pada bulan Januari 2000 sebagai hasil kerjasama Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jember

ALAMAT REDAKSI

Kampus FKIP Universitas Jember

Jln. Kalimantan III/3 Jember Kotak Pos 162 Tlp/Fax (0331) 334988.

E-mail JAPI-jurnal@yahoo.com

Rekening Bank : Suranto No. 030.000541188.920 BNI 46 Cabang Jember

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL terakreditasi sebagai *Jurnal Ilmiah Nasional* dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 52/DIKTI/Kep/2002 tanggal 12 Nopember 2002

<i>Strategi Perjuangan Palestina Melawan Israel</i> Nurul Umamah	260-271
<i>Performance Assessment Sebagai Strategi Peningkatan Proses Perkuliahan Makroekonomi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan IPS FKIP Universitas Jember</i> Pramono Adi Sardjono	272-283
<i>Pengaruh Etnis, Pekerjaan Orang Tua dan Lingkungan Tempat Tinggal Terhadap Sikap Kewirausahaan Para Siswa Sekolah Menengah di Kota Jember</i> Bambang Hari Purnomo	284-298
<i>Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Jember</i> Wachju Subchan	299-311
<i>Efek Perubahan Kelembagaan - Dalam Otonomi Daerah Terhadap Perilaku dan Kinerja Birokrat</i> Hary Yuswadi	312-326
<i>Konflik Kelembagaan Organisasi Pemerintahan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pemerintahan Desa di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)</i> Kukuh Budi Mulya	327-339
<i>Distribusi Pendapatan Kontribusinya dalam Pembangunan Ekonomi Jawa Timur</i> Priyono	340-354
<i>Tax Advantage of Debt and Capital Structure</i> Reikman Aritonang	355-364
<i>Penggunaan Analisis Faktor dalam Bauran Pemasaran untuk Perencanaan Strategi Pemasaran pada Perguruan Tinggi</i> Deasy Wulandari	365-374
<i>Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendidikan Non Formal</i> Muljono	375-384
<i>Kegagalan Partai-partai Buruh dalam Pemilihan Umum 1999 (Suatu Perspektif Sejarah)</i> Sumarjono	385-395
<i>Mengelola Kesehatan Manager: Upaya Memampukan Kinerja Organisasi</i> Suhartono	396-402

DISTRIBUSI PENDAPATAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI JAWA TIMUR

Priyono

Abstract: The government's policy which has prioritized the industrial sector has shifted the economic structure from agriculture to industrial-based economy. However, the shift of economic structure is not followed by labor structure. This study observed East Java income distribution using Social Accounting Matrix Analysis. The result revealed that in general East Java income distribution in the year 2000 worsened. This was indicated by the lower added value contribution to labor production factor, the discrepancy of income distribution, and the shift of added value which was not followed by the labor shift. There was also discrepancy in the distribution of income between economic sector and region (urban and rural).

Kata Kunci: Distribusi Pendapatan, Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi sebelum krisis, telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, terutama sektor industri (sekunder) dan sektor jasa (tersier), sedangkan sektor pertanian (primer) tumbuh lebih lambat dibanding dua sektor sebelumnya, sehingga terjadi pergeseran struktur ekonomi selama kurun waktu tersebut. Kontribusi sektor primer, sekunder dan tersier dalam PDB, atas dasar harga konstan 1993, telah bergeser dari masing-masing 43,9 persen; 19,2 persen; dan 36,9 persen pada tahun 1980 menjadi masing-masing 24,5 persen; 33,8 persen; dan 41,7 persen tahun 1996, tetapi pergeseran struktur ekonomi yang terjadi belum diikuti oleh pergeseran struktur tenaga kerja yang terdiri dari masing-masing 60,3 persen; 11,2 persen; dan 36,3 persen pada tahun 1980 menjadi masing-masing 48,2 persen; 15,5 persen; dan 36,3 persen tahun 1996 (Lihat Tabel 1). Kondisi serupa secara umum juga terjadi di negara sedang berkembang (NSB) yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi. Indikator tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi pada saat itu ternyata belum mampu melepaskan penderitaan rakyat kecil karena hasil pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Setelah lima tahun krisis berlalu ekonomi mulai tumbuh dan sektor industri kembali menjadi lokomotif pembangunan ekonomi, tetapi bagaimana dengan distribusi pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja.

Priyono adalah Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang

Tabel 1. Struktur Ekonomi Jawa Timur Menurut *Product Domestic Regional Bruto* dan Tenaga Kerja 1980 dan 1996

Sektor	PDRB (%)		Tenaga kerja (%)	
	1980	1996	1980	1996
<i>Primer</i>	43,9	24,5	60,3	48,2
<i>Sekunder</i>	19,2	33,8	11,2	15,5
<i>Tersier</i>	36,9	41,7	28,5	36,3
JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Krisis ekonomi telah menyadarkan semua pihak, utamanya pengambil kebijakan dan pelaku ekonomi untuk meninjau kembali paradigma pembangunan ekonomi yang dikembangkan selama ini. Di sisi lain, dampak dari pembangunan ekonomi ternyata hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak menikmati hasil pembangunan ekonomi yang dicapai. Kondisi tersebut dikarenakan tidak meratanya distribusi pendapatan. Jawa Timur sebagai salah satu propinsi dengan penduduk lebih dari 45 juta jiwa mempunyai arti sangat significant terhadap perekonomian nasional. Sebagai layaknya masyarakat Indonesia pada umumnya kemiskinan akibat dari distribusi pendapatan yang tidak merata juga dirasakan masyarakat Jawa Timur.

Berbagai kajian tentang kemiskinan dan pemerataan telah dilakukan dan umumnya sepakat bahwa kemiskinan dan pemerataan merupakan masalah pelik dan sensitif dalam pembangunan ekonomi. Karenanya, dalam membangun selalu diperhatikan segi pemerataan di samping pertumbuhan. Teori lama mengajarkan bahwa "pemerataan akan dengan sendirinya makin baik setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu (*trickle down effect*), dan untuk mengejar pertumbuhan cepat, pemerataan harus dikorbankan lebih dulu. Hal ini sudah dianggap usang bagi perencanaan ekonomi pembangunan kontemporer" (Syachinuddin, 1997).

Sementara pandangan lain mengungkapkan bahwa "pemerataan dan pengentasan kemiskinan harus diupayakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan tidak perlu menunggu kue hasil pembangunan menjadi besar dulu". Bahkan banyak yang mengkhawatirkan efek *trickle down* karena berbagai sebab, tidak bisa otomatis terealisasi. Dan yang terjadi justru sebaliknya, *trickle up*, karena dalam kondisi surplus tenaga kerja, buruh digaji sangat rendah, dan usaha kecil selalu kalah dalam posisi tawar-menawar.

Untuk alasan ekonomis maupun sosial-politis, Indonesia berusaha mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam upaya pengembangan ekonomi. Dengan program dan target khusus diusahakan membantu golongan miskin, di samping kebijakan pembangunan ekonomi makro yang memprioritaskan sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, yang merupakan golongan terbanyak dan terbawah. Dua program besar

terakhir adalah Inpres Desa Tertinggal, dan dengan bantuan para pengusaha besar dibentuk Yayasan untuk mengelola program keluarga sejahtera.

Apakah program dan kebijakan pemerataan ini berhasil, sering menjadi perdebatan, karena pemerintah juga sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi lewat ekspor, dan dalam pelaksanaannya banyak melakukan kebijakan yang kontradiktif dengan pemerataan. Beberapa pihak, juga Bank Dunia, mengatakan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia yang *broad based* dan program mensejahterakan rakyat cukup berhasil, baik dalam mengurangi kemiskinan maupun pemerataan pendapatan.

Menurut Hananto (1997), "Secara sosial politis, kemiskinan kurang menimbulkan dampak negatif dibandingkan pemerataan. Penduduk miskin, umumnya berpendidikan rendah, berada di pedesaan dengan sarana dan prasarana minimal.

Jaringan komunikasi yang terbatas dan konsern sosial yang hanya bersifat lokal, serta budaya tradisional yang masih kental, tidak menimbulkan masalah yang meletup-letup. Paling hanya dipakai sebagai bahan untuk dipolitikkan oleh golongan menengah oposisi".

Pemerataan pendapatan, yang berhulu pada persoalan ekonomi lebih mendasar menyangkut pemerataan kesempatan berusaha, yang kemudian terfokus pada permasalahan transparansi, demokrasi dan keadilan hukum, menjadi masalah yang sangat sensitif. Karena menyangkut langsung golongan menengah yang biasanya vokal, dan mempunyai kemampuan berusaha. Masalah ini semakin besar dengan semakin membesarnya golongan menengah, sesuai dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi tidak disertai dengan nuansa *keadilan*, maka masalah pemerataan akan semakin sensitif, dan akan semakin besar dengan meningkatnya pendapatan nasional. Karena yang penting bagi golongan ini bukan hanya hasil pembangunan tetapi juga proses pencapaian hasil tersebut. Dengan kritis mereka akan melihat, keberpihakan pemerintah, pemberian fasilitas, adanya kolusi, korupsi, dan sebagainya.

Disadari sulit mencari data yang mewakili (*representatif*) dan kemampuan teori analisis yang tersedia. Umumnya, data dan teori yang tersedia tidak bisa memberikan posisi yang jelas tentang tingkat kemiskinan dan pemerataan. Kemiskinan kurang dipersoalkan, karena penduduk miskin tidak cukup canggih untuk berbohong, dan kehidupannya juga sederhana. Kesungguhan pencacah saja yang menentukan apakah data yang diperoleh baik atau tidak. Berapa persen atau berapa banyak penduduk miskin mestinya mudah dihitung jika pencacah bersungguh-sungguh. Tetapi disini pun, masih terjadi *under-estimation*, sehingga perlu dilakukan *perapihan* data terlebih dahulu, sebelum angka pengeluaran penduduk dapat dipakai untuk menentukan penduduk miskin. Memang perapihan

dilakukan dengan *statistical judgement* untuk menjaga konsistensi, tetapi di sini bisa menjadi dasar kericuan tentang kepercayaan terhadap angka penduduk miskin.

Perdebatan mengenai kemiskinan dan pemerataan, muncul terutama disebabkan cakupan data yang tidak memadai dan akurasinya untuk menggambarkan struktur dan besarnya permasalahan. Peningkatan cakupan dan akurasi dan membutuhkan dana yang sangat mahal dan komitmen kerja yang sungguh-sungguh. Walaupun demikian hasilnya belum tentu memuaskan karena data pendapatan rumah tangga, terutama untuk golongan atas pada saat sekarang tidak mudah (tidak mungkin) bisa diperoleh dengan benar.

Sejak tahun 1976 laporan Bank Dunia memang konsisten "memuji" keberhasilan Indonesia dalam bidang kesejahteraan rakyat. Tetapi banyak ahli yang menyatakan bahwa pembagian pendapatan di Indonesia menjadi sangat timpang. Banyak pejabat pemerintah sendiri, bahkan sampai tingkat menteri, mengakui bahwa masih terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup serius di Indonesia.

Isu mengenai pemerataan telah menimbulkan berbagai pendapat. Banyak yang berpendapat bahwa, data pengeluaran rumah tangga tidak bisa dipakai sebagai *proxy* pendapatan untuk menggambarkan distribusi pendapatan. Tetapi masih banyak pihak menggunakannya dan salah interpretasi dalam analisis perkembangan, termasuk BPS dan Bank Dunia. Secara konseptual data pengeluaran tidak bisa menggantikan data pendapatan untuk mengukur pemerataan pendapatan, walaupun hanya untuk menunjukkan *trend*.

Akibat majunya komunikasi massa global, adanya kemiskinan dan ketidakmerataan di tengah kemajuan ekonomi, akan membawa dampak sosial-politik yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan. *Demonstration effect* dari pembangunan ekonomi negara-negara lain, besar pengaruhnya bagi pembangunan suatu negara. Karena itu, isu kemiskinan dan ketimpangan harus ditangani sejak awal. Banyak ahli percaya bahwa *trade-off* antara pemerataan dan pertumbuhan bisa dihindarkan. Dengan kebijakan pembangunan yang tepat, meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku ekonomi, akan meningkatkan daya beli dan *effective demand* sehingga merangsang pertumbuhan produksi.

Pengeluaran golongan berpendapatan rendah cenderung lebih besar dari pendapatannya, karena mereka biasanya menerima transfer, subsidi, sumbangan, pemberian, dan sebagainya, atau meminjam untuk kebutuhan membeli makanan (*dissaving*). Jadi pendapatan yang sebenarnya lebih rendah dari pengeluarannya. Sebaliknya untuk golongan atas, pendapatan jauh di atas pengeluarannya (*saving*). Besarnya jumlah *saving* berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Sehingga *saving rate* terus meningkat, karena penghasilan terus berkembang. Di samping itu, jumlah pengeluaran rumah tangga kaya juga cenderung *under-estimate*, karena sangat bervariasi dan banyak pengeluaran individual anggota rumah tangga dilakukan di luar rumah. Tingkat *under estimate*, karena sangat bervariasi dan

banyak pengeluaran individual anggota rumah tangga dilakukan di luar rumah. Tingkat *under estimation* ini juga berhubungan dengan tingkat pendapatan.

Hubungan sosial dan ekonomi masyarakat dimulai dari kenyataan, bahwa masyarakat mempunyai kebutuhan dasar (*basic needs and want*), yang harus dipenuhi melalui pembelian sejumlah komoditi. Total permintaan efektif terhadap komoditas terpenuhi oleh sektor-sektor produksi, seperti tenaga kerja, modal dan aktivitas lain dalam produksi. Permintaan turunan (*derived demand*) terhadap faktor produksi tenaga kerja memberi balas jasa berupa upah dan gaji; sedang terhadap faktor produksi modal memberi balas jasa berupa keuntungan, deviden, bunga, sewa dan pendapatan kapital lainnya. Distribusi pendapatan yang diterima masing-masing faktor produksi dirinci menurut sektor ekonomi yang terlibat dalam proses produksi, dan disebut distribusi pendapatan faktorial. Pendapatan faktorial tersebut diterima oleh berbagai pelaku ekonomi, seperti: rumah tangga (pendapatan rumah tangga), perusahaan (keuntungan perusahaan) dan pemerintah (pajak).

Tulisan ini mengungkap keberhasilan pembangunan ekonomi pasca krisis dengan memberikan evaluasi kritis pada hasil dari upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, bukan pada cara pencapaian hasil tersebut. Dengan evaluasi kritis masalah kemiskinan dan pemerataan pendapatan diharapkan posisi *status quo* bisa disimak, sebenarnya sampai sejauh mana kemiskinan sudah bisa dientaskan yang sekarang ini masih ada. Apakah pemerataan makin membaik atau memburuk, sebagai masukan apa yang masih harus diusahakan untuk program selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah diskriptif kuantitatif, dengan mendiskripsikan distribusi pendapatan yang dapat disusun berdasarkan informasi data. Distribusi pendapatan di Jawa Timur dianalisis berdasarkan data Input-Output (I-O) 2000 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Informasi tentang upah dan gaji (baris 201) dan surplus usaha (baris 202) dari tabel I-O Jawa Timur tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun *Social Accounting Matrik* (SAM) dengan susunan matrik 57 x 57, sebagai matrik yang menguraikan struktur distribusi pendapatan di Jawa Timur. Kolom input primer pada tabel I-O, merupakan informasi nilai tambah (*value added*) dari masing-masing sektor. Selanjutnya dari input primer tersebut dapat diperoleh informasi tentang: a) pendapatan faktor produksi, b) pendapatan rumah tangga, c) penyusutan dan d) pajak tak langsung.

Focus analisis adalah pada: 1) distribusi pendapatan faktor produksi meliputi pendapatan tenaga kerja dan pendapatan bukan tenaga kerja (kapital) berupa keuntungan yang dinikmati oleh pemilik modal, dan 2) distribusi pendapatan rumah tangga.

Dalam analisis ini, tenaga kerja diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: a) menurut jenis pekerjaan, dan b) tempat usaha yang dibedakan antara desa dan kota. Besarnya distribusi pendapatan tenaga kerja, berupa upah dan gaji, nilai besarnya merupakan gambaran atas besarnya alokasi nilai tambah yang diciptakan sektor ekonomi ke faktor produksi tenaga kerja. Sedang distribusi pendapatan rumah tangga diklasifikasikan menjadi beberapa golongan meliputi: buruh, petani, pengusaha golongan rendah dan golongan atas.

Selain analisis di atas untuk membandingkan hasil analisis ini dengan kajian-kajian yang pernah ada sebelumnya juga cari besarnya koefisien Gini (*Gini ratio*), agar diperoleh informasi apakah distribusi pendapatan yang berjalan semakin merata atau sebaliknya. Tingkat ketimpangan didekati melalui koefisien Gini Ratio pendapatan, sebagai pelengkap dalam metode Lorenz, dengan cara membandingkan luas daerah kurva Lorenz (θ) dengan daerah segitiga (ΔABC) sama kaki dalam kurva yang sama, hasil perbandingan menggambarkan tingkat ketimpangan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Ketimpangan rendah, bila :

$$1.GR : \frac{\text{Luas } (\theta)}{ABC} < 0,3$$

2. Ketimpangan sedang, bila

$$GR : 0,3 \frac{\text{Luas } (\theta)}{ABC} < 0,5$$

3. Ketimpangan tinggi, bila

$$GR : 0,5 \frac{\text{Luas } (\theta)}{ABC} < 0,5$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Pendapatan (Faktorial)

Proses produksi menghasilkan nilai tambah yang teralokasi ke dalam 4 (empat) komponen, meliputi: 1) upah dan gaji, 2) surplus usaha, 3) pajak tak langsung, dan 4) penyusutan, dua komponen pertama merupakan pendapatan masyarakat, sebagai balas jasa atas keterlibatan masyarakat dalam proses produksi, berupa tenaga kerja dan penyertaan modal. Dalam analisis *Social Accounting Matrix* (SAM) pendapatan faktor produksi (pendapatan faktorial) terdistribusi menjadi dua, yaitu: a) pendapatan tenaga kerja, dan b) pendapatan bukan tenaga kerja.

Permasalahan yang dapat ditelaah dari kerangka *Social Accounting Matrik* (SAM), antara lain distribusi pendapatan faktor produksi (*tenaga kerja* dan *kapital*), distribusi pendapatan rumah tangga (institusi) yang berasal dari upah dan gaji

dan/atau kapital, tergantung keterlibatan rumah tangga dalam proses produksi serta hasil produksinya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya tenaga kerja yang tidak menerima upah dan gaji (tenaga kerja yang tidak dibayar), seperti anggota keluarga pada usaha tani, industri rumah tangga, jasa serta sektor usaha lain. Oleh karena itu, tenaga kerja yang tidak dibayar merupakan tenaga kerja yang terpisah dengan tenaga kerja yang menerima upah dan gaji. Konsep serupa juga digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan rumah tangga golongan rumah tangga yang tidak jelas, karena tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok rumah tangga tertentu.

a. Distribusi Pendapatan Tenaga Kerja

Distribusi pendapatan tenaga kerja menggambarkan distribusi atau pola pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan pekerja, berupa upah dan gaji, sebagai informasi atas alokasi nilai tambah yang diciptakan sektor ekonomi ke faktor produksi tenaga kerja. Distribusi pendapatan tenaga kerja meliputi pendapatan tenaga kerja berupa upah dan gaji (*termasuk imputasi upah dan gaji*) dirinci menurut klasifikasi tenaga kerja dan menurut lapangan usaha.

Secara agregat, total pendapatan tenaga kerja dari upah dan gaji yang dibayar adalah Rp 17.458.031,24 juta (31,16%) sedang yang tidak dibayar adalah Rp 4.051.461,29 juta (18,54%). Sementara menurut alokasi usaha, total pendapatan tenaga kerja di desa diperkirakan sebesar Rp 11.231.267,10 juta (52,22%) dan sisanya sebesar Rp 10.278.225,53 juta (47,78%) merupakan pendapatan tenaga kerja di kota. Hasil analisis menunjukkan, alokasi pendapatan dari upah dan gaji, terbesar diterima kelompok pekerja tata usaha, penjualan dan jasa-jasa, penerimaan upah dan gaji berlokasi di kota (10). Secara keseluruhan pendapatan kelompok pekerja tersebut adalah Rp 4.028.856,87 juta (18,73%) dari Rp 21.509.492,53 juta, kemudian disusul pekerja pertanian kelompok bukan penerima upah dan gaji di desa (3), kelompok ini secara keseluruhan memperoleh pendapatan sebesar Rp 4.008.854,26 juta (18,64%). Walau akumulasi pendapatan kedua kelompok pekerja tersebut paling besar dibanding kelompok pekerja lainnya, tetapi bukan berarti kedua kelompok tersebut memperoleh upah dan gaji per ekuivalen tenaga kerja (ETK), karena tergantung dari banyaknya jumlah satuan ETK pada masing-masing kelompok pekerja.

Rata-rata upah dan gaji per ETK, merupakan informasi yang menggambarkan nilai upah dan gaji, yang diterima setiap satu ETK, dari informasi ini dapat analisis perbedaan pendapat tenaga kerja yang diterima menurut klasifikasi tenaga kerja (jenis pekerjaan) dan menurut lapangan usaha, baik di pedesaan maupun di kota. Informasi rata-rata upah dan gaji per ETK secara agregat disajikan pada tabel 2, yang menunjukkan, pekerja tata usaha, kelompok penjualan dan jasa-jasa, bukan penerima upah dan gaji di kota (12) penerima upah tertinggi, rata-rata

upah dan gaji yang diterima sebesar Rp 6,52 juta per ETK per tahun, rata-rata upah dan gaji tertinggi kedua, diterima oleh kelompok pekerja profesi, teknisi, manager dan militer, penerima upah dan gaji di kota (14) dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 6,09 juta per ETK per tahun. Pekerja sektor pertanian, bukan penerima upah dan gaji di pedesaan (3) menerima pendapatan rata-rata sebesar Rp 810,42 ribu per ETK per tahun.

Secara agregat, rata-rata pendapatan tenaga kerja dari upah dan gaji untuk kelompok tenaga kerja yang dibayar adalah Rp 3,97 juta per ETK per tahun, dan yang tidak dibayar adalah Rp 995,90 ribu per ETK per tahun, sementara rata-rata pendapatan tenaga kerja dari upah dan gaji, menurut lokasi tempat usaha secara agregat di desa sebesar Rp 2,96 juta per ETK per tahun.

Tabel 2. Rata-Rata Pendapatan Tenaga Kerja per ETK, Jawa Timur Menurut Klasifikasi Pekerja dan Lokasi (Ribu Rp./Tahun)

Klasifikasi Pekerja			Rata-Rata
Pertanian penerima upah dan gaji	Pedesaan	1	1.145,43
	Kota	2	1.485,84
Pertanian Bukan penerima upah dan gaji	Pedesaan	3	810,42
	Kota	4	925,30
Produksi, operator alat angkut manual, penerima upah dan gaji	Pedesaan	5	1.315,68
	Kota	6	1.978,96
Produksi, operator alat angkut manual, bukan penerima upah dan gaji	Pedesaan	7	566,64
	Kota	8	657,42
Tata usaha, penjualan dan jasa-jasa penerima upah dan gaji	Pedesaan	9	2.504,26
	Kota	10	5.280,43
Tata usaha, penjualan dan jasa-jasa bukan penerima upah dan gaji	Pedesaan	11	1.050,57
	Kota	12	6.524,81
Profesi, teknisi, manajer, militer penerima upah dan gaji	Pedesaan	13	5.869,51
	Kota	14	6.091,96
Profesi, teknisi, manajer, militer bukan penerima upah dan gaji	Pedesaan	15	2.442,30
	Kota	16	2.619,81
	Dibayar		3.968,93
Rata-rata	Tidak Dibayar		995,90
Rata-rata	Pedesaan		1.031,42
	Kota		2.959,03
Rata-rata			1.494,19

Sumber: Hasil Analisis

Total pendapatan tenaga kerja di desa sebesar Rp 11.231.258 juta, sedikit lebih besar dibanding total pendapatan di kota sebesar Rp 10.278.217 juta, bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja pedesaan yang hampir dua setengah kali dari tenaga kerja di kota, dimana tenaga kerja di pedesaan (menurut SUPAS Jawa Timur, 1995) adalah 10.952.788 orang dan di kota 4.617.839 orang, maka rata-rata

pendapatan tenaga kerja di desa adalah Rp 1,03 juta per tahun, dan di kota Rp 2,23 juta per tahun.

Rata-rata pendapatan tenaga kerja sektor pertanian sebesar Rp 1.476,39 ribu per tahun per ekivalen tenaga kerja (ETK), sedang rata-rata pendapatan tenaga kerja sektor bank dan asuransi tertinggi adalah sebesar Rp 10.798,05 ribu per tahun per ETK atau hampir 10 kali dari yang diterima oleh tenaga kerja sektor pertanian, menunjukkan pendapatan secara kuantitatif. Juga ditunjukkan hasil analisis terhadap distribusi pendapatan sektoral yang dihitung dengan menggunakan Gini ratio pendapatan. Perbandingan hasil perhitungan Gini ratio pendapatan dengan hasil penelitian sebelumnya disajikan pada tabel 4.

b. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Distribusi pendapatan rumah tangga merupakan alokasi pendapatan faktor produksi yang diterima oleh berbagai instansi. Salah satu institusi dalam kerangka SAM adalah rumah tangga. Selain rumah tangga institusi lain yang menerima alokasi pendapatan faktor produksi adalah perusahaan berupa investasi, dan pemerintah berupa pajak tak langsung. Pendapatan institusi selain dari faktor produksi (upah dan gaji serta surplus usaha), juga diperoleh dari transfer antar institusi (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah), serta transfer dari luar negeri.

Rumah tangga setelah diklasifikasikan dalam 10 (sepuluh) golongan menurut sektor usaha, yang secara umum dibedakan antara rumah tangga pertanian dan rumah tangga bukan pertanian. Rumah tangga pertanian meliputi: rumah tangga buruh tani, petani dengan luas tanah < 0,5 ha, petani dengan luas tanah 0,5 – 1,0 ha, dan petani dengan luas tanah > 1,0 ha. Rumah tangga bukan pertanian dibedakan menjadi dua, rumah tangga bukan pertanian di desa dan di kota, yang masing-masing dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan.

Rumah tangga petani dicerminkan dalam satuan rumah tangga yang didefinisikan sebagai rumah tangga, yang memperoleh pendapatan utama dari hasil mengusahakan lahan pertanian (usaha tani). Pendapatan rumah tangga petani adalah semua pendapatan yang diterima oleh rumah tangga petani, baik yang berupa pendapatan kepala rumah tangga maupun berupa pendapatan anggota-anggota rumah tangga, yang berasal dari kegiatan utama, yaitu usaha tani berupa pendapatan dari upah dan gaji, kapital dan transfer.

Total pendapatan rumah tangga sebesar Rp 43.214.176,10 juta. Sumber pendapatan rumah tangga terbesar berasal dari upah dan gaji (jasa tenaga kerja), yaitu sebesar Rp 21.509.492,53 juta (49,77%). Kedua berasal dari kapital sebesar Rp 1.945.381,08 juta (39,21%), dan sisanya Rp 4.759.302,49 juta (11,02%) berasal dari transfer berbagai institusi. Alokasi pendapatan rumah tangga, Rp 35.968.831 juta (83,23%) digunakan untuk konsumsi akhir, dan sisanya untuk membayar pajak, pembayaran transfer ditabung.

Jumlah pendapatan seluruh rumah tangga buruh pertanian yang beranggota sekitar 3,8 juta jiwa sebesar Rp 2.536.450,91 juta (5,87%) dari total pendapatan rumah tangga, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 661,57 ribu per kapita per tahun, merupakan golongan rumah tangga yang mempunyai pendapatan per kapita terendah dibanding golongan rumah tangga lainnya. Golongan rumah tangga yang memperoleh pendapatan terbesar adalah kelompok pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas di kota, dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 11.934.916,34 juta (27,62%), dan rata-rata pendapatan sebesar Rp 3.075,22 ribu per kapita per tahun hampir lima kali pendapatan rumah tangga golongan buruh tani (tabel 3).

Tabel 3. Distribusi Pendapatan / Kapita Menurut Golongan Rumah Tangga Jawa Timur, 2000.

Golongan Rumah Tangga		Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)	Total Pendapatan (Juta Rp.)	Pendapatan/ Kapita/ Tahun (Ribu Rp.)
1	Bur u h	3.834	2.536.450,91	661,57
2	Petani tanah < 0,50 Ha	7.972	6.905.965,53	866,28
3	Petani tanah 0,50 < 1,00 Ha	2.022	2.088.544,77	1.032,91
4	Petani tanah >= 1,00	2.094	3.353.339,82	1.601,40
5	Pengusaha bebas golongan rendah, tata usaha, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan di desa	2.925	2.958.751,02	1.011,54
6	Bukan angkatan kerja di desa	505	786.629,21	1.557,68
7	Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan di desa.	4.279	5.476.519,21	1.513,56
8	Pengusaha bebas golongan rendah, tata usaha, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan di desa	4.098	4.939.954,35	1.205,46
9	Bukan angkatan kerja di kota	848	1.233.104,95	1.454,13
10	Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan di desa.	3.881	11.934.916,34	3.075,22
Total		32.459	43.214.176,10	1.331,35

Sumber: Hasil Analisis

Rumah tangga petani dengan luas tanah < 0,5 ha secara kumulatif, jumlah pendapatan yang diperoleh cukup besar yaitu Rp 6.905.965,53 juta (15,98%) dari total pendapatan seluruh rumah tangga. Tetapi jumlah anggota rata-rata pendapatan perkapita menjadi rendah, yaitu sebesar Rp 866,28 ribu per kapita per tahun, lebih

rendah dari pendapatan rumah tangga pengusaha bebas golongan rendah di desa, dengan pendapatan sebesar Rp 1,01 juta per kapita per tahun. Secara umum, rata-rata pendapatan per kapita rumah tangga pertanian, terutama buruh tani paling rendah dibanding golongan rumah tangga lain, dan rata-rata pendapatan rumah tangga di kota relatif lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan rumah tangga di desa untuk jenis pekerjaan yang sama.

Tabel di atas menunjukkan, bahwa kesenjangan pendapatan antar rumah tangga dari kesepuluh golongan rumah tangga juga terjadi terutama antara rumah tangga buruh (pekerja kasar) dan rumah tangga petani gurem di satu pihak dengan golongan rumah tangga lainnya. Perbedaan rata-rata pendapatan per kapita terendah dengan tertinggi, dalam hal ini antara pendapatan rumah tangga buruh tani dengan pendapatan rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota, sebesar Rp 2.41,63 ribu per kapita per tahun.

Golongan petani gurem yang memiliki tanah < 0,500 ha sebagian besar pendapatan rumah tangga berasal dari kapita bukan dari upah dan gaji. Sebaliknya untuk keluarga petani dengan pemilikan tanah > 0,501 ha jumlah penerimaan rumah tangga dari upah dan gaji lebih besar dibanding dengan penerimaan dari kapital. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani yang dilakukan petani pada tanah sempit ternyata lebih efisien dibanding dengan yang memiliki tanah yang lebih luas. Sementara dari sisi penerimaan transfer, rumah tangga pertanian luas, mengingat sebagian transfer adalah subsidi. Berarti subsidi pertanian yang diberikan pemerintah lebih banyak dinikmati petani kaya yang memiliki tanah luas, semakin luas tanah pertanian cenderung menerima subsidi lebih besar.

2. Pemerataan Pendapatan

Masalah pemerataan pendapatan tampaknya sangat rumit, karena permasalahannya biasanya berakar pada ketidakadilan ekonomi dan sosial politis. Penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, kekuatan lobi, korupsi, tidak adanya transparansi, dan sebagainya, yang kemudian secara luas juga termami-festasikan dalam ketidakadilan hukum dan politik. Ekonomi semakin lebih maju dan pendapatan nasional lebih tinggi, ketidakmerataan distribusi pendapatan semakin menjadi masalah lebih gawat. Karena semakin banyak dan semakin pandai orang yang bisa melihat *kendak-adilan* tersebut.

Tingkat kesenjangan pendapatan sektoral di Jawa Timur tahun 2000, dengan Gini ratio, sebesar 0,44 (termasuk dalam kategori sedang). Gini ratio di wilayah kota sebesar 0,48 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibanding dengan ketimpangan pendapatan di pedesaan (0,37). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Sam Poli (1976), yang menyimpulkan ketimpangan di Indonesia dalam kategori yang sedang tetapi berbeda dengan kesimpulan Bank Dunia dan perhitungan Gini ratio BPS sebesar 0,31 (kota dan

desa), 0,31 (kota), dan 0,27 (desa) yang menunjukkan tingkat kesenjangan rendah. Persamaan hasil analisis dengan perhitungan BPS adalah kesenjangan pendapatan di kota yang relatif lebih tinggi dibanding dengan di desa, walau tingkat kesenjangan pendapatan yang berbeda.

Tabel 4. Pangsa Pengeluaran, Gini Pengeluaran, Gini Pendapatan Di Indonesia dan Jawa Timur, Tahun Tertentu.

Daerah	Tahun	Indonesia			Jawa Timur	
		Pangsa Pengeluaran < 40 %	Gini Ratio		Gini Ratio	
			Word Bank	Pendapatan	Pengeluaran	Pendapatan
			BPS	Sampoli	BPS	Hasil Analisis
Kota	1976	-	-	0,49	-	-
	1990	-	0,34	-	-	-
	1993	-	0,33	-	0,32	-
	1994	-	-	-	0,31	-
	2000	-	-	-	-	0,48
Desa	1976	-	-	0,49	-	-
	1990	-	0,25	-	-	-
	1993	-	0,26	-	0,28	-
	1994	-	-	-	0,27	-
	2000	-	-	-	-	0,37
Kota	1970	6,9	0,35	-	-	-
Desa	1976	-	0,34	0,52	-	-
	1980	7,7	0,34	-	-	-
	1990	8,7	0,32	-	-	-
	1992	9,5	0,30	-	-	-
	1993	-	0,34	-	0,32	-
	1994	-	-	-	0,31	-
	2000	-	-	-	-	0,44

Sumber: Hananto, BPS dan Hasil Analisis.

Karena itu koefisien Gini yang dihitung dari data pengeluaran selama bertahun-tahun hanya menghasilkan angka berkisar 0,3 (tidak ada ketimpangan pendapatan), dengan trend sedikit menurun. Karena memang pengeluaran golongan bawah meningkat, sedang pengeluaran golongan atas cenderung konstan (sudah jenuh). Sam Poli dan juga BPS pernah menghitung rasio Gini dengan data pendapatan rumah tangga yang dikumpulkan dalam Sakernas (satu-satunya Sakernas yang mengumpulkan total pendapatan rumah tangga). Hasilnya Gini = 0,56 (ketimpangan yang serius), sedang dari data pengeluaran Susenas Gini = 0,3 (sangat merata). Kontradiksi ini menyebabkan data pendapatan tidak dikumpulkan

lagi dalam sakernas berikutnya. Sayang banyak pengguna menafsirkan salah angka Gini pengeluaran yang masih terus dihitung dan dianalisis BPS.

Perbedaan Gini Ratio antara hasil analisis dengan publikasi BPS, perhitungan Bank Dunia dan hasil analisis di atas disebabkan oleh adanya perbedaan pendekatan dalam mengukur pendapatan besarnya pengeluaran masyarakat dengan pendekatan besarnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi. Sedang dalam penelitian ini distribusi pendapatan dianalisis berdasarkan pendapatan sektoral. Secara konseptual data pengeluaran kurang tepat untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat, dengan pertimbangan: 1) Pengeluaran masyarakat dengan golongan pendapatan rendah cenderung lebih besar dari pendapatannya, karena penerimaan diluar pendapatan seperti, transfer, subsidi, sumbangan, atau meminjam untuk kebutuhan makanan (*dissaving*); 2) Golongan atas, pendapatannya jauh lebih besar dari pengeluaran (*saving*) dimana besarnya saving berhubungan positif dengan pendapatan, dan 3.) Data pengeluaran rumah tangga golongan atas cenderung lebih rendah dari realitasnya (*underestimate*), karena banyak pengeluaran individu anggota keluarga dilakukan di luar rumah yang tidak terekam.

Distribusi pendapatan faktor produksi selain pendapatan tenaga kerja adalah pendapatan faktor produksi kapital (bukan tenaga kerja), yang berupa keuntungan, deviden, bunga, sewa rumah, dan lainnya sebagai balas jasa kapital yang diikutsertakan dalam suatu proses kegiatan produksi. Untuk memperoleh informasi tentang distribusi pendapatan kapital, distribusi pendapatan bukan tenaga kerja (kapital) secara agregat, diklasifikasikan menjadi 7 kelompok.

Hasil analisis menunjukkan, alokasi pendapatan bukan tenaga kerja dari kapital terbesar diterima kelompok modal usaha berasal dari luar negeri sebesar Rp 8.919.844,54 juta (26,36%) dari surplus usaha sebesar Rp 33.835.574,30 juta. Alokasi distribusi terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah, modal swasta dari dalam negeri dengan alokasi pendapatan sebesar Rp 7.235.990,34 juta (21,39%), dan modal lain-lain yang berlokasi di kota, dengan alokasi pendapatan sebesar Rp 5.963.896,60 juta (17,63%). Distribusi pendapatan dari surplus usaha yang diterima faktor produksi tanah dan modal pertanian lainnya relatif kecil, yaitu sebesar Rp 4.514.927,31 juta (13,34%).

Mengenai distribusi desa-kota (urban-rural) kemiskinan, mana yang lebih mendekati kebenaran tentu memerlukan evaluasi yang lebih cermat, terutama tentang data dan metodologinya yang digunakan. Tetapi nampaknya angka urban Bank Dunia terlalu rendah. Memang secara mutlak berapa jumlah penduduk miskin, sangat sensitif sekali dengan batas kemiskinan yang diterapkan. Jumlahnya bisa bertambah banyak dengan sedikit saja menggeser batas kemiskinan ke atas.

Juga perlu ditelaah lebih dalam perbedaan persentase penduduk miskin BPS dan Bank Dunia. Angka BPS menunjukkan persentase kemiskinan di desa lebih tinggi dari daerah kota, sedangkan angka Bank Dunia sebaliknya. Perbedaannya

terletak pada metodologi pengukuran. Bank Dunia untuk batas kemiskinan menggunakan paket komoditi yang sama dan perbedaan desa kota hanya karena perbedaan harga. Sedang BPS menggunakan paket komoditi yang berlainan, tergantung dari pola konsumsi murah di rural. Hal ini menyebabkan batas kemiskinan di rural lebih rendah dan persentase penduduk miskin di dikritik, karena tidak sesuai dengan semua indikator kesra yang menunjukkan keadaan di rural lebih jelek dari keadaan di urban. Dalam hal ini tentunya angka Bank Dunia lebih konsisten.

Semua orang setuju bahwa *trend* persentase penduduk miskin menurun. Pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan pengurangan kemiskinan. Dengan memprioritaskan pertanian dan pengembangan industri padat karya, pembangunan ekonomi Jawa Timur mempunyai landasan yang luas. Ditambah dengan berbagai program langsung, maupun tidak langsung, kehidupan golongan bahkan diakui oleh Bank Dunia, sebagai program yang terbaik di antara negara berkembang, setidaknya hal itu terjadi sebelum krisis.

Sebenarnya yang penting bukan kenyataan adanya ketimpangan distribusi pendapatan, tetapi justru penyebabnya tersebut. Distribusi pendapatan yang tidak merata (biasanya tidak parah), tidak akan menimbulkan gejolak jika memang terjadi karena *market forces*. Sebaliknya ketimpangan karena ketidakadilan (biasanya lebih parah), masalahnya tidak akan bisa diredam hanya dengan kompensasi diciptakannya program-program khusus pengentasan kemiskinan, yang diharapkan bisa mengurangi ketidakmerataan. Yang penting bukan mengalihkan perhatian terhadap masalah ini, tetapi faktor keadilan tersebutlah yang harus dieliminir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan ekonomi makro yang mendorong ekspor dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang didukung sektor industri, serta apa yang terjadi dalam pelaksanaannya (terlepas dari program khusus pengentasan kemiskinan), cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Beberapa bukti bisa dikemukakan berupa meningkatnya konsentrasi usaha di berbagai sektor.

Industrialisasi yang padat kerja, yang terjadi dalam tahap awal sebagai konsekuensi dari kebijakan *export oriented*, karena menyerap tenaga kerja relatif sangat kecil dibanding dengan besarnya angkatan kerja, tidak menambah sama sekali *struktur employment* di Jawa Timur.

Pembagian pendapatan pertama dalam upah dan gaji, surplus usaha, sewa, bunga dan rente dinamakan *distribusi pendapatan primer*. Distribusi primer nilai tambah Jawa Timur tahun 2000 adalah 29,1 persen untuk upah/gaji dan 50,7 persen berupa surplus usaha (termasuk bunga modal). Persentase upah dan gaji tersebut sangat rendah karena jumlah tenaga kerja jauh lebih besar dibanding pemilik modal.

Ketimpangan pendapatan sektoral dan ketimpangan pendapatan regional cenderung melebar. Ketimpangan pendapatan sektoral ditunjukkan pergeseran struktur ekonomi yang tidak disertai dengan pergeseran tenaga kerja, sedang ketimpangan pendapatan regional ditunjukkan oleh besaran Gini ratio pendapatan masing-masing 0,48 (kota), 0,37 (desa) dan 0,44) desa dan kota.

Perlu ada pengkajian ulang tentang model industrialisasi di wilayah Jawa Timur. Beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi di Jawa timur adalah kebijakan di bidang export, sistem penggajian pegawai, dan perbaikan distribusi pendapatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Damanhuri, Didin S. 1997. "Perekonomian Indonesia dalam Kontek Paradigma Baru Pembangunan Pada Abad 21" *Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Hananto, Sigit. 1977. "Kemiskinan dan Ketimpangan Pembagian Pendapatan Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia" *Mencari Paradikma Baru Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Prabowo, Dibyo. 1997. "Agro Industri di Indonesia", *Tinjauan Ekonomi Indonesia*, Catur wulan 2, Tahun II, No.3. April.
- Santoso, Ismanto Hadi. 2000. "Keterkaitan Antar Sektor dan Distribusi Pendapatan Jawa Timur". *Disertasi*, Universitas Airlangga. Surabaya
- Seman, Syachrinuddin. 1997. "Kemiskinan dan Ketimpangan Pembagian Pendapatan Dalam Pembangunan Daerah". *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- World Bank. 1998. *Indonesia In Crisis. A Macroeconomic Update*: Washington DC